

GAGASAN “INDONESIA RAYA” DI SEMENANJUNG MALAYA DALAM SEJARAH PERGERAKAN MALAYSIA (1945-1950)

Samudra Eka Cipta

Universitas Indonesia

Email: samudra.eka@ui.ac.id

Bondan Kanumoyoso

Universitas Indonesia

Email: bondan.kanumoyoso@ui.ac.id

Wawan Darmawan

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: wawand@upi.edu

ABSTRAK

Selama kurun waktu 1945-1950 wilayah Semenanjung Malaya menghadapi masa revolusi. Namun masa revolusi tentunya berbeda dengan di Indonesia yang mana Indonesia dihadapkan pada Agresi Militer Belanda dan juga tantangan dalam diplomasi dengan Belanda. Di negeri Jiran tersebut justru dihadapkan pada kekosongan kekuasaan, sehingga timbul sebuah upaya dari para Pemuda Melayu untuk mewujudkan Melayu Raya dengan bergabungnya Malaya ke Indonesia. Usaha tersebut gagal karena ada upaya Inggris untuk melakukan supremasi kekuasaan dengan mengajak para Kesultanan Melayu di bawah naungan UMNO untuk membuat sebuah pemerintah yang dikenal sampai saat ini sebagai Kerajaan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metodologi sejarah dan deskriptif analisis untuk menggambarkan situasi di Malaya sesuai dengan periodeisasi yang berlaku di Malaysia.

Kata Kunci: *UMNO, PKMM, Melayu, Malaya, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Secara umum, Indonesia dan Malaysia pada dasarnya memiliki ras etnis yang sama, yaitu Ras Melayu. Hal ini terlihat dari kesamaan antara Bahasa Indonesia dan Malaysia yang memiliki beberapa kosakata yang sama meskipun arti dan pengucapannya sedikit berbeda di antara keduanya. Sehingga faktor ini pada masa awal Kemerdekaan Malaysia, Inggris dan Jepang berusaha untuk mewujudkan persatuan dan persaudaraan sebagai sesama orang Melayu. Padahal secara historis kedua negara tersebut memiliki persamaan dalam sejarah sebelum pada akhirnya kolonialisme bangsa Barat di Asia Tenggara.

Faktor inilah yang menyebabkan kedua negara tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memperoleh kemerdekaannya masing-masing melakukan cara yang berbeda. Indonesia memperoleh kemerdekaan tanggal

17 Agustus 1945 dengan melahirkan teks proklamasi yang di dalamnya menjunjung tinggi tentang kemerdekaan dan mengecam kolonialisme tentu saja turut dan juga di dalam mendukung Malaysia yang pada akhirnya merdeka dua tahun sesudahnya. Setelah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, Indonesia kerap memberi tambahan bantuan dengan cara memutar lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu yang berjudul Terang Bulan di radio.

Pertentangan antara Indonesia bersama dengan Malaysia (setelah diganti nama dari Persekutuan Tanah Melayu) tidak dapat dihindari. Kemesraan antara Indonesia bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu tidak terjadi lama dikarenakan kecenderungan Persekutuan Tanah Melayu yang condong ke Barat. Kecondongan Persekutuan Tanah Melayu tersebut sangat menyadari keluar kala adanya perjanjian bersama dengan Inggris yang

dinamakan AMDA (*Anglo-Malaya Defence Agreement*). Terlebih kala adanya isu-isu bahwa Malaysia, Inggris dan Amerika Serikat mengakibatkan poros untuk menghancurkan pemerintahan Indonesia suasana jadi bertambah panas (Fatah, 2008).

Latar belakang kedua tokoh yang berbeda antar Tunku Abdul Rahman dan Soekarno yang menjadikan adanya kerenggangan antara kedua negara serumpun ini. Dimana Tunku Abdul Rahman yang mengenyam pendidikan terakhir di Cambridge University, London. Di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama setelah Malaysia berdaulat, Malaysia lebih memfokuskan hubungan luar negerinya dengan negara-negara Barat, yang mempunyai sistem pemerintahan dan ideologi yang seialiran dengannya.

Nasionalisme ala Soekarno menjadi suatu pemahaman bahwa musuh yang harus dilawan adalah untuk melawan imperialisme dan terlihat dalam setiap kebijakan luar negerinya. Dapat diartikan bahwa perubahan situasi politik yang demikian tentu tidak dapat dilepaskan dari peran pemimpin negara yang menjabat.

Meskipun secara politik Indonesia dengan Malaysia saling bermusuhan akan tetapi, sebelum muncul isu pertentangan Sukarno-Tunku Abdul Rahman terdapat beberapa organisasi Pemuda Malaya yang ingin menjadikan Malaya bagian dari Indonesia dengan mendesak Sukarno ketika melakukan kunjungannya di Perak guna melakukan negoisasi antara Pemuda Malaya yang dipimpin oleh Baharudin Helmy dengan rombongan Sukarno agar segera menjadikan Malaya bagian dari Indonesia. Meskipun usulan yang disampaikan oleh Baharudin Helmy tidak digubris sama sekali oleh Sukarno karena terhalang oleh *Treaty of London* (Traktat London) di masa kolonialisme dan imperialisme Barat di Asia Tenggara.

B. METODE PENELITIAN

Data yang diolah berdasarkan dengan studi kepustakaan yakni dengan menggunakan berbagai macam sumber literasi yang mendukung dalam kajian ini. Sumber-sumber

yang digunakan menggunakan buku, jurnal, dan beberapa sumber internet yang dapat dipertanggung jawaban. Menggunakan pendekatan kualitatif artinya kajian ini ditulis berdasarkan penggambaran deskriptif dari sumber yang didapatkan. Juga menggunakan metodologi historis sebagai pengembangan kajian.

Studi analisis bukan sekedar menjadikan isi pesan sebagai objeknya, melainkan juga terkait dengan konsepsi-konsepsi yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik dalam dunia komunikasi. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi atau keterangan-keterangan yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah datanya dengan memperhatikan konteksnya.

Metode lain yang digunakan oleh penulis adalah metode studi konten isi yakni dengan menggunakan pendekatan studi literatur dari beberapa sumber dengan mengkaji beberapa temuan berupa pengumpulan buku-buku sebagai sumber referensi sekaligus pembandingan sumber pada pembahasan ini, juga menggunakan metode historis untuk melihat perkembangan pembelajaran sejarah di Indonesia dengan melihat peristiwa berejarah di Indonesia. Menurut Helius Sjamsuddin (2015), mengatakan bahwa metode historis diawali dengan tahapan pengumpulan data, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah sebagai kerangka berpikir dalam suatu penelitian yang sifatnya historis. Hal tersebut sebagaimana merujuk pada pernyataan Ismaun (2016) yakni, penelitian sejarah memiliki tahapan mulai dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Semangat Nasionalisme di Semananjung Malaya

Semangat nasionalisme generasi muda Semenanjung Malaya tumbuh dari kalangan pelajar dan guru di perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, Distrik Perak. Mereka itu di antaranya, Hadi bin Haji Hassan, Nordin bin Haji Harun, Zainal Abidin bin Ahmad (Zaaba), dan Buyung Adil.

Beberapa pelajar perguruan Sultan Idris terkenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan,

antara lain; Ibrahim Haji Yaacob, Abdul Karim Rashid, Yaacob Amin, Isa Mahmud, dan Hassan bin Haji Manan. Maktab perguruan Sultan Idris mendirikan organisasi politik untuk memperbaiki martabat orang Melayu dan mengakhiri penjajahan (Saifullah, 2010:55).

Berbagai macam perjuangan dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam Malaysia melalui organisasi-organisasi. Ahmad Fuad dengan Partai Islam Semalaya (PAS) 1951, Tuanku Abdul Rahman Putera dengan UMNO, Ide Dato Onn dengan PKM (Partai Kemerdekaan Malaya), Majelis Islam Tertinggi se-Malaya (MATA) dipimpin Burhanuddin al-Helmy. Hizbul Muslimin (HANIM) 1948 dipimpin Bakar al-Bakir, dan lain-lainnya.

Munculnya Gagasan Indonesia Raya di Semenanjung Malaya

Indonesia Raya atau Melayu Raya adalah konsep politik yang bertujuan untuk mempersatukan ras Bangsa Melayu yang terpisah dalam wilayah koloni Britania Raya di Semenanjung Malaya dan Borneo Utara (wilayah yang kini membentuk negara Malaysia, Singapura, dan Brunei), dengan Hindia Belanda (kini Indonesia), serta wilayah koloni Portugis di Timor Leste menjadi suatu bangsa besar dan berdaulat.

Gagasan Melayu Raya ini diajukan pertama kali oleh seorang guru sejarah dari Universitas Pendidikan Sultan Idris, Abdul Hadi Hassan, Malaya Britania. Selain karena persamaan suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya kebanyakan rakyatnya sebagai bangsa serumpun dan serantau di Nusantara.

Gagasan ini didasari kesadaran sejarah bahwa wilayah Malaya Britania, Borneo Utara, dan Hindia Belanda dulu pernah dipersatukan dalam sebuah kerajaan superior, seperti Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor-Riau, yang akhirnya dipisahkan oleh kolonialisme Inggris dan Belanda.

Pada akhir dekade 1920-an gagasan membentuk negara kebangsaan yang merdeka dan berdaulat tumbuh di antara rakyat koloni Hindia Belanda. Sementara di Semenanjung Malaya gagasan untuk membentuk Melayu Raya diajukan.

Di Hindia Belanda, tokoh pemuda pergerakan nasional lebih memusatkan perhatian pada gagasan untuk menyusun negara kebangsaan Indonesia sebagai pewaris Hindia Belanda jika kelak menjadi negara merdeka. Pada tahun 1928 dicetuskanlah Sumpah Pemuda yang bertujuan mempersatukan Bangsa Indonesia dalam satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan.

Kelompok nasionalis Melayu, yaitu Kesatuan Melayu Muda, yang didirikan oleh Ibrahim Yaacob pada tahun 1938, adalah salah satu organisasi yang secara tegas menganut gagasan konsep negara Indonesia Raya atau Melayu Raya sebagai cita-cita perjuangannya.

Upaya Pemuda Melayu dalam Pengintegrasian Malaya-Indonesia

Di akhir kekuasaan Jepang, Juli 1945 Organisasi Persatuan Melayu Muda berganti nama menjadi K.R.I.S. (Kesatuan Semenanjung Republik Indonesia) yang diketuai langsung oleh Ibrahim Haji Yakoob dan Baharuddin al Helmy. Di sisi lain, Inggris terus berupaya untuk menghasut khususnya para sultan Melayu untuk bekerja sama kembali dengan Inggris. Inggris sangat ingin menguasai kembali Semenanjung Malaya. Pada tanggal 5 September 1945 Jenderal Inggris Sir Harold Mac Michael membentuk suatu perjanjian yang diberi nama Malay Unions. Sehingga dampak dari terbentuknya Persatuan Melayu menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa, terutama dari P.K.M. (Partai Komunis Melayu Malaya) yang sangat anti terhadap imperialisme Inggris, juga K.R.I.S. dan menganggapnya sebagai upaya untuk memecah belah orang Melayu. Namun, alangkah baiknya jika Ibrahim Haji Yakoob dan Baharuddin al Helmy ingin mewujudkan cita-cita Persatuan Melayu Raya dengan harapan bisa langsung berada di bawah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pada tanggal 8 Agustus 1945 Sukarno, Hatta, dan Radjiman datang ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Terauchi untuk membahas lebih lanjut Kemerdekaan Indonesia. Dari hasil pertemuan tersebut, Sukarno menyatakan bahwa seluruh Kemerdekaan Indonesia yang ditaklukkan oleh Jepang, tetapi

tidak melibatkan wilayah Semenanjung Malaya dan sebagian Kalimantan Utara. Dalam perjalanannya kembali ke Indonesia, rombongan Soekarno singgah sejenak ke Taiping dan disana ia bertemu dengan Ibrahim Haji Yakoob dan Baharuddin Helmy untuk menyatakan kesetiannya kepada Republik Indonesia. Ibrahim Haji Yakoob juga menjanjikan Sukarno untuk membawa delegasinya dari K.R.I.S. untuk datang ke Jakarta dan menghadiri upacara pengibaran Bendera Merah Putih. Sebenarnya Republik Indonesia sudah dua kali mengalami kemerdekaan. Pertama, kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang setiap tahun selalu diperingati, kemerdekaan merupakan hasil kesepakatan kelompok-kelompok muda atau lowongan Jepang di Indonesia. Kedua, kemerdekaan 27 Desember 1949 merupakan kemerdekaan de facto hasil KMB (Konferensi Meja Bundar), setelah menjalani dinamika Belanda-Indonesia yang sangat berat pada saat itu (Cipta, 2019). Orang Melayu di Malaya menyambut hangat kemerdekaan Indonesia dengan menggelar acara penyambutan berskala besar. Seperti yang terjadi di kota Kuala Kangsar tempat pengibaran Bendera Merah Putih. Hal ini sangat mengancam Inggris setelah kekalahan Jepang, maka Inggris melakukan aksi yaitu dengan menangkap beberapa tokoh K.R.I.S (Kesatuan Republik Indonesia Semenanjung) dan orang-orang yang dianggap pro terhadap "Republik Indonesia". Baharuddin Helmy dan Ibrahim Haji Yakoob sempat kabur ke Indonesia. Baharuddin sendiri melarikan diri ke Riau, sedangkan Ibrahim Haji Yakoob segera melarikan diri ke Jakarta untuk meminta perlindungan kembali ke Sukarno. Apa yang diharapkan oleh para pemimpin K.R.I.S. untuk menuai hasil perjuangan mereka berupa integrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia tidak tercapai karena Inggris merebut kembali wilayah Malaya. Sehingga wilayah Malaya menjadi "tanah tak bertuan".

Pada hakikatnya baik Melayu Raya maupun Indonesia Raya adalah gagasan politik yang sama persis. Keengganan untuk menamai Melayu Raya karena berbeda dengan di Malaya, di Indonesia istilah Melayu lebih merujuk kepada suku Melayu yang dianggap

hanyalah sebagai salah satu dari berbagai suku bangsa di Nusantara, yang memiliki kedudukan yang setara dengan Minangkabau, Aceh, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Dayak, Bugis, Makassar, Minahasa, Ambon, dan lain sebagainya.

Penghimpunan berdasarkan ras atau suku bangsa Melayu dikhawatirkan rawan dan kontra-produktif dengan persatuan Indonesia yang mencakup berbagai suku bangsa, agama, budaya, dan ras karena banyak suku bangsa di Indonesia Timur seperti orang Papua, Ambon, dan Nusa Tenggara Timur, bukanlah termasuk rumpun Melayu Austronesia, melainkan rumpun bangsa Melanesia.

Dalam konteks keindonesiaan, puak Melayu telah memberi sumbangan yang sangat berarti bagi Indonesia, yaitu dengan diangkatnya Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia, bahasa nasional yang juga milik etnis lain. Inilah sumbangan kebudayaan Melayu yang tidak ternilai harganya bagi sebuah negeri yang bernama Indonesia. Jika dalam perkembangannya Bahasa Indonesia tidak terlalu gampang dipahami oleh warga pemilik asalnya masyarakat Melayu sesungguhnya itu merupakan konsekuensi logis dari karakter Bahasa Melayu sendiri yang luwes, sederhana, dan inklusif.

Di tahun 1824 lewat *Treaty of London* (Traktat London) menjadikan daerah Timur menjadi dua belahan, Inggris menguasai Tanjung Malaka dan Belanda mengontrol kepulauan Indonesia. Memang wilayah Indonesia sampai ke wilayah yang sekarang menjadi Malaysia, namun pegangan wilayah hanya mencakup Nederlandsch Indie, bangsa Indonesia menyatakan Proklamasi Kemerdekaan. Angan-angan tokoh Melayu pembentukan negara Indonesia Raya atau Melayu Raya kalau terjadi akan sangat merugikan Indonesia.

Para pendiri bangsa Indonesia tidak merespons keinginan mereka. Dan Indonesia tetap diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian setelah bertemu tokoh pejuang Melayu itu. Memang wilayah Indonesia bisa mencapai Malaysia (kalau berdasarkan ras Melayu). Sebagian Nusa Tenggara, sebagian Maluku dan juga Papua-Irian tidak termasuk Indonesia. Wilayah-wilayah itu tidak bermukim,

tidak didiami oleh orang-orang Melayu ras Mongoloid. Padahal Papua-Irian merupakan wilayah kaya sumber daya alam, baik hasil tambang maupun hutan dan kelautan.

Pada tahun 1955, Ibrahim Haji Yacoob bertemu dengan Tunku Abdul Rahman dalam agenda menuju Malaysia di bawah naungan Indonesia Raya. Terjadi konflik di antara mereka, dimana Tenku Abdul Rahman memerintahkan kemerdekaan Malaysia di bawah Persemakmuran Inggris. Namun, Inggris terus mengancam, terutama kepada mereka yang sangat mendukung kemerdekaan Malaysia di bawah naungan Indonesia Raya. Misalnya, Ahmad Boestaman kemudian ditangkap oleh Inggris. Namun Ahmad Boestaman dibebaskan lagi oleh Inggris dan segera mendirikan Partai Rakyat Malaya sekaligus mendirikan Front Sosialis Buruh Malaya. Ideologi Partai Rakyat Malaya banyak direformasi oleh pemikiran Sukarno dan sangat erat kaitannya dengan ideologi Marhanenisme-Sosialisme.

Haluan P.K.M.M. dalam Mewujudkan Indonesia Raya di Semenanjung

Mengingat situasi politik di Malaysia di tahun 1945, tidak stabil sehingga situasi ini dimanfaatkan oleh P.K.M. (Partai Komunis Malaya). tampil sebagai penguasa. Mayoritas anggota P.K.M. adalah orang Tionghoa, mereka berusaha membuat "Republik Komunis Malaya". Jelas, tindakan ini menimbulkan reaksi keras baik dari tokoh nasionalisme Inggris maupun Melayu untuk melakukan perlawanan terhadap P.K.M. Hingga akhirnya Baharuddin Helmy dengan perasaan cemas akan ancaman Inggris, kembali ke Malaya untuk meredam pergerakan oleh P.K.M. Di Malaya, Baharuddin Helmy bersama beberapa mantan pemimpin K.R.I.S. seperti Mokhtaruddin Lasso, Ahmad Boestaman dan Zulkifli Owni setelah Inggris membubarkannya dengan mendirikan kembali P.K.M.M. (Partai Kebangkitan Melayu Malaya). Partai selalu mengedepankan jargon "Indonesia-Malaya Bersatu" yang jelas kemana arah partai politik.

Beberapa poin dari gerakan P.K.M.M.

1. Mempersatukan bangsa Melayu, menanamkan semangat kebanggaan di

hati orang Melayu dan bertujuan untuk mempersatukan Melayu dalam satu keluarga besar, NKRI.

2. Bertujuan untuk mencapai hak atas kebebasan berbicara, bergerak, berpikir, dan menuntut pelajaran.
3. Mengangkat kedudukan iktisad orang Melayu dengan memajukan bisnis agama dan pertanian serta mengangkat derajat orang Melayu.
4. Ingin bisa mencetak buku sendiri, memajukan mahasiswa secara demokratis, sehingga mengangkat kedudukan orang Melayu dan Indonesia, dalam strategi politik untuk meningkatkan kepentingan orang Melayu.
5. Partai Nasionalis Melayu ingin bekerja sama dengan bangsa lain dan hidup sebagai orang Melayu dan menjadi bagian dari kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya.

Pada saat yang sama, Dato Oon Djafar membentuk Perhimpunan Melayu dengan mendirikan U.M.N.O. (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) (Basri, 1986). U.M.N.O kemudian bekerjasama dengan P.K.M.M untuk membahas lebih lanjut nasib orang Melayu. Secara garis besar kedua organisasi baik P.K.M.M., maupun U.M.N.O. memiliki orientasi yang sama, yaitu keinginan untuk memantapkan kemerdekaan bagi Melayu. Kedua organisasi tersebut pernah bekerja sama dan sama-sama tidak kooperatif terhadap Inggris. Namun, hubungan di antara mereka tidak bertahan lama. P.K.M.M. memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan UMNO. P.K.M.M. kemudian berganti nama menjadi PUTERA MALAYA, lebih memilih bekerjasama dengan P.K.M. yang sebelumnya telah dikalahkan karena usulan pembentukan Republik Komunis Malaya. PUTERA MALAYA dan P.K.M. mereka sepakat untuk membentuk Dewan Aksi Bersama Seluruh Malaya. Lagi-lagi, situasi ini membuat Inggris semakin cemas dan mencoba untuk menyetujui para pemimpin U.M.N.O. Kerajaan Inggris dan Sultan Melayu bersama U.M.N.O. mereka sepakat untuk mengusulkan "Tanah Tanah Guild". Puncaknya adalah ketika Tunku Abdul Rahman selaku

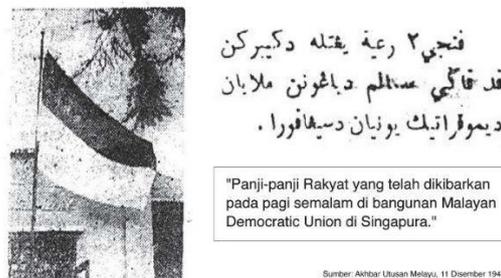
pimpinan U.M.N.O. terus menerus melakukan lobi ke Inggris yang berujung pada terbentuknya *United Kingdom-Malaysia Commonwealth* pada 31 Agustus 1957. Peran Baharuddin Helmy semakin melemah dalam perjuangan politik Melayu untuk bergabung dengan Indonesia. Padahal posisi Ibrahim Haji Yacoob sudah berada di Jakarta, dan pernah menjadi Perwira TNI AD. Seperti halnya pada Serangan Umum 1 Maret 1949, Ibrahim Haji Yacoob sempat ditugaskan ke Yogyakarta. Menjelang akhir hayatnya, Ibrahim Haji Yacoob dialektika oleh Soekarno menjadi ahli DPR RI hingga setelah peristiwa 30 September 1965 ia mengundurkan diri. Selama Konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1967 Ibrahim Haji Yacoob dilarang kembali ke Malaysia. Akhirnya Ibrahim Haji Yacoob meninggal dan dimakamkan di makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Sedangkan nasib Baharuddin Helmy hingga kini belum bisa dipastikan apakah ia masih mampu bertahan dalam dominasi pengaruh paham identitas Malaysia menurut Tunku Abdul Rahman.

Kiprah Ibrahim Haji Yacoob dalam Gerakan Hartal di Malaya

Pada 20 Oktober 1947, merupakan sebuah peristiwa bersejarah di negara jiran dan tiap tanggal tersebut semestinya diperingati oleh rakyat Malaysia. Sebab, pada tahun itu terjadinya aktivitas protes yang dilakukan oleh kalangan buruh dan pemuda Melayu untuk menentukan nasib mereka dalam sebuah perwujudan “Kemerdekaan Malaysia”. Para tokoh-tokoh Melayu lantas kemudian menyuarakan pendapatnya untuk mendapatkan pengakuan secara politik dalam penentuan nasib Malaysia. Dikutip dari *The Patriots* pada (2020) dengan judul *Hartal 1947: Mogok Pertama di Tanah Melayu* menyebutkan, bahwa “Hartal” merupakan sebuah istilah yang berasal dari India yang artinya “mogok” dari segala aktivitas. Munculnya Gerakan Hartal dilatarbelakangi oleh sebuah keputusan yang diambil oleh Inggris saat itu untuk menjadikan wilayah Semenanjung Malaya sebagai wilayah persemakmuran. Sedangkan saat itu, tidak semua para tokoh Pergerakan Melayu tidak menyepakati usulan yang direncanakan oleh Inggris. Beberapa tokoh yang tidak sepakat di

antaranya adalah Mokhtaruddin Lasso yang merupakan pendiri dari P.K.M.M. (Partai Kebangsaan Melayu Malaya) yang beraliran komunisme. Kemudian, Ahmad Boestamam yang merupakan pendiri dari API (Angkatan Pemuda Insjaf), dan Ibrahim Haji Yacoob.

Ahmad Bustamam merupakan tokoh kemerdekaan Malaysia yang pro terhadap Indonesia, sehingga ia kerap ditahan oleh para lawan politiknya baik ketika Inggris masih menguasai Malaya maupun ketika Konfrontasi Indonesia Malaysia 1963 terjadi. Ia juga memperjuangkan konsep “Melayu Raya” yang meliputi Malaya, Indonesia, Singapura (Temasek), dan Borneo. Hal ini juga diperkuat oleh sebuah buku yang ditulis oleh *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran (1997)*, pada buku tersebut dijelaskan bahwa para tokoh Melayu yang tidak sependapat konsep “negara boneka” ala Inggris karena ada romantisme sejarah ketika Majapahit berhasil menaklukkan wilayah “Nusantara Raya” dengan dibuktikan adanya temuan Prasasti Ligor A dan B, sebagai tanda kependudukan Majapahit atas Semenanjung Malaya (Saat, I.2010).



(Sumber: Surat Kabar Melayu, Terbitan Desember 1947 dalam Huruf Jawi)

Dua tahun sebelum terjadinya Hartal 20 Oktober 1947, tepatnya di tanggal 13 Agustus 1945, dua tokoh Melayu yakni Ibrahim Haji Yacoob dan Baharuddin Helmy sudah terlebih dahulu mendirikan K.R.I.S. (Kesatuan Republik Indonesia Semenanjung), sebelum pada akhirnya dibubarkan oleh Inggris dan kemudian bergabung dengan P.K.M.M. K.R.I.S sudah dibentuk sejak Juli 1945 dengan memanfaatkan konflik Inggris-Jepang menjelang akhir PD II atas wilayah Malaya. Kemudian perwakilan dari K.R.I.S. bertemu dua kali dengan Sukarno di Taiping dan Jakarta untuk menentukan nasib

Malaysia. Namun, malang setelah gagal upaya perwujudan “Melayu Raya”, organisasi tersebut sudah dibubarkan.

Gerakan Hartal 20 Oktober 2020, diinisiasi oleh PUTERA yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1947. Organisasi tersebut merupakan yang terdiri dari P.K.M.M. (Partai Kebangsaan Melayu Malaya), Angkatan Wanita Sedar, Gerakan Angkatan Muda (GERAM), Barisan Tani se-Malaya, dan Hizbul Muslimin. Organisasi ini juga merupakan organisasi yang berideologi Komunis. Selain, oleh etnis Melayu, Gerakan Hartal juga diinisiasi oleh AMJCA (*All Malayan Council of Joint Action*) yang didirikan oleh Tan Cheng Lok seorang Tionghoa Malaysia yang berusaha untuk persatuan etnis di Malaysia. Kemudian, kedua organisasi tersebut pada akhirnya sepakat untuk melawan pengaruh Inggris dengan menarik masa untuk melakukan protes atau mogok kerja di pabrik-pabrik milik koloni Inggris, restoran, kedai kopi, dan pelabuhan sebagai pusat perekonomian. Tak hanya sampai disitu saja, kemudian PUTERA dan AMJCA juga mengibarkan “Bendera Rakyat” yang menyerupai bendera Indonesia dengan bintang yang berjumlah 12, melambangkan 12 negeri di Semenanjung Malaya. Dikutip dari Amin, Iskandar (2007) lalu, dengan judul artikel *60 Tahun Selepas Hartal*, menyebutkan tujuan dari gerakan mogok masal yang dilakukan oleh AMJCA dan PUTERA adalah untuk mendesak Inggris agar terwujudnya Malaya Merdeka. Namun, kemudian Inggris membentuk organisasi politik yang dianggap sebagai kontra dari apa yang dilakukan oleh AMJCA dan PUTERA adalah organisasi UMNO (*United Malay Nation Organization*) dan MCA (*Malaysian Chinese Association*), sebagai organisasi pro Inggris.

Kemudian PUTERA dan AMCJA berhasil dibubarkan oleh UMNO dan MCA, karena UMNO adalah sebuah organisasi dimana Inggris mencari dukungan melalui para sultan-sultan yang memimpin di tiap wilayahnya (negara bagian), para sultan kemudian dijanjikan dapat menjadi “*Yang Dipertuan Agong*” atau Raja Malaysia secara bergiliran. Sedangkan MCA merupakan bentuk ajakan kolonial Inggris kepada orang Tionghoa Malaysia dalam menguasai aspek ekonomi

terutama di wilayah Singapura (sebelum merdeka tahun 1951). Alih-alih apa yang dilakukan oleh Inggris dianggap menguntungkan namun sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Inggris adalah berusaha untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang selalu dihadapkan dengan masalah rasial pada periode selanjutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya UU Ketuanan Melayu sebagai bentuk “Supremasi Etnis Melayu”. Mahayana, 2007 dalam sebuah tulisannya menyebutkan bahwa UU Malaysia Pasal 153 yang membahas UU Ketuanan Melayu dengan menjadikan etnis Melayu sebagai “etnis istimewa” di atas etnis lain seperti India dan Tionghoa sebagai etnis terbesar lainnya. Tentunya, UU tersebut mendapatkan penolakan oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) yang diketuai oleh Lee Kuan Yew (ex PM Singapura), dan Partai Aksi Demokratik (DAP), sebagai suatu partai yang menentang adanya rasisme dan senantiasa berusaha untuk mewujudkan persatuan (Arifin, 2014).



(Sumber Surat Kabar Kebayan Jelita)

Namun, sayangnya justru isu rasisme di Malaysia masih terus terjadi hingga saat ini dan sudah mulai masuk kehidupan personal seseorang. Malaysia menempatkan posisi kedua sebagai negara terasis kedua setelah Afrika Selatan (Saat & Zainun, t.t.). Sedangkan posisi AS dan Indonesia yang kasus diskriminasi serius berada di posisi ke-13 dan 14, yang menandakan bahwa kedua negara tersebut tingkat rasismenya tidak separah Malaysia karena rasisme di Indonesia atau AS hanya sebatas pada rasisme secara personal

tidak sampai ranah politik, meskipun AS sepanjang tahun 1950-1960, isu rasismenya sempat pada ranah politik, sebelum kemunculan Malcolm X dan Martin Luther King Jr. sebagai aktivis pembebasan kaum keturunan Afrika di Amerika. Sehingga, Malaysia seharusnya belajar pada Indonesia agar menciptakan suasana toleransi.

Kiprah Ibrahim Haji Yakoob di Masa Demokrasi Terpimpin

Ketika di masa Demokrasi Terpimpin Ibrahim Haji Yakoob membentuk KEMAM (Kesatuan Malaya Merdeka) yang berjuang untuk kemerdekaan Malaya dari Indonesia. Ibrahim juga menjadi anggota pimpinan PNI (Partai Nasional Indonesia) cabang Jakarta Raya hingga tahun 1958. Ketika era "Demokrasi Terpimpin", Ibrahim sempat menjadi anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) mewakili Riau. Di dalam Kempen Trikora (Tri Komando Rakyat), Ibrahim dilantik sebagai Bendahara Kongres Rakyat Indonesia sekitar 1958-1960.

Ketika Kebijakan Dwikora (Dwi Komando Rakyat), Ibrahim kembali memimpin KEMAM, dan membantu proses penghantaran pasukan ke Malaya dan Borneo Utara Hingga Tahun 1964 dan dilantik sebagai seorang pegawai kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ketika Peristiwa 30 September berlaku, Ibrahim ditugaskan untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan Partindo dan membersihkannya dari unsur-unsur komunis. Setelah membubarkan Partindo, Ibrahim bergabung dan menjadi Ketua III Partai Murba pada tahun 1967.

Menjelang Kemerdekaan Malaysia

Berakhirnya Perang Pasifik dengan kekalahan berada dipihak Jepang, telah mendorong negara-negara Eropa paling tidak, Belanda dan Inggris yang pernah mempunyai tanah jajahan di wilayah Asia Tenggara, merasa perlu menengok kembali koloninya yang dulu ketika diserang Jepang, mereka tinggalkan begitu saja. Bagi Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya, persoalannya tinggal, bagaimana mempertahankan kemerdekaannya itu; mengisinya dan menjalankan roda

pemerintahan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sementara itu, tahun-tahun awal selepas berakhir perang Pasifik, bagi Malaysia persoalannya lain lagi. Bagi Malaysia, kemerdekaan yang dicapai Indonesia tanpa melibatkan Tanah Melayu, seolah-olah merupakan sebuah rangkaian perjalanan yang berakhir dengan kegagalan. Sungguhpun demikian, semangat untuk mencapai cita-cita menjadikan Malaysia sebagai negara yang merdeka, tidak sama sekali pudar; perjuangan mesti dilanjutkan. Ibrahim Yaakob dan beberapa pemimpin K.R.I.S. lainnya kemudian terbang ke Indonesia dan selanjutnya melakukan perjuangannya dari Indonesia (Budiawan, 2015).

Salah satu yang menjadi penyebab gagalnya pembentukan Indonesia Raya di Semenanjung Malaya adalah konflik rasial yang dimulai sejak pertengahan Agustus 1945. Diawali oleh P.K.M. yang didominasi etnis Cina, telah diidentikkan oleh masyarakat Melayu sebagai orang-orang Cina secara keseluruhan. Maka tidak terhindarkan, kerusuhan rasial pun terjadi. Pada saat kerusuhan itu merebak ke beberapa kota di Tanah Melayu, antara lain, Batu Pahat, Batu Kikir, Kuala Pilah (Negeri Sembilan), Kuala Kangsar (Perak), Raub (Pahang), Sungai Manik, Lambar Kanan, dan Pantai Remis, pasukan Inggris datang dan memberlakukan Pendudukan Militer Inggris (British Military Administration) 5 September 1945. Satu hal yang sangat kebetulan, Inggris berhasil meredam kerusuhan rasial itu (Reza, Fahmi, 2018). Dengan demikian, kedatangan Inggris, sungguh terjadi pada saat yang tepat. Sebab, ketika Tanah Melayu dilanda kerusuhan rasial, saat itulah Inggris datang dan dianggap dapat menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu pula, kedatangan Inggris mendapat sambutan yang cukup baik. Meskipun kerusuhan rasial dapat dipadamkan, P.K.M. sendiri masih terus melakukan aksinya. Paling tidak, mereka telah berhasil menyusupkan anggota-anggotanya ke dalam serikat-serikat pekerja (*Labour Union*) yang belakangan kemudian dapat mendirikan Serikat Pekerja Pusat (*Central Labour Union*) di Singapura pada bulan Oktober 1945. Ketika trauma kerusuhan rasial dan permusuhan etnis Cina-Melayu belum

sama sekali padam, Inggris mengumumkan sebuah rencana pembentukan Kesatuan Malaya (*Malayan Union*), 10 Oktober 1945. Banyak pihak yang menentang gagasan tersebut. Masalahnya, beberapa butir dari rencana pembentukan *Malayan Union* dipandang akan sangat merugikan golongan Melayu dan raja-raja Melayu. Beberapa butir gagasan tersebut, antara lain, bahwa kekuasaan dalam *Malayan Union* akan dipegang oleh seorang gubernur, sementara kekuasaan raja-raja dibatasi hanya untuk urusan adat istiadat dan soal-soal yang menyangkut agama (Islam). Butir lain yang amat ditentang masyarakat Melayu adalah pemberian kelonggaran kewarganegaraan bagi orang yang dilahirkan di Tanah Melayu. Kaum pendatang (etnis Cina dan India) yang memainkan peranan penting dalam perekonomian Tanah Melayu diberi hak kerakyatan yang sama dengan orang Melayu. Dengan begitu, orang Melayu sebagai pribumi kehilangan hak istimewanya (Choung, 2012).

Banyak organisasi-organisasi pergerakan di Masa Bersiap yang harus dibubarkan sehingga UMNO tampil mengisi kekosongan, karena UMNO-lah satu-satunya organisasi politik yang mendapat restu pemerintah Inggris. Dalam perkembangannya, perjuangan UMNO mulai berubah, terutama setelah Tunku Abdul Rahman menjadi Ketua UMNO. Perjuangannya kemudian tidak hanya untuk kepentingan golongan Melayu, tetapi juga golongan non-Melayu serta tetap berusaha memperoleh kemerdekaan dari tangan Inggris. Belakangan, setelah UMNO membentuk Partai Perikatan, yang merupakan koalisi dari UMNO, Malayan Chinese Association (MCA) dan Malayan Indies Congress (MIC). Perjuangan UMNO tidaklah sia-sia. Setelah pemilu pertama, 31 Juli 1955, Partai Perikatan yang didominasi UMNO, memperoleh kemenangan gemilang. Tunku Abdul Rahman kemudian menjadi Ketua Menteri Pertama untuk tanah Melayu mulai 31 Juli 1957. Sebulan kemudian, Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kemerdekaannya, 31 Agustus 1957. Malaysia yang membangun negerinya dengan semangat kebudayaan Melayu, telah berhasil menempatkan negerinya dalam posisi yang sangat penting dalam

hubungan sosial-politik-budaya di kawasan Semenanjung (Zaki, Johari, Mohd., 2017).

Singapura yang merdeka dan menjadi negara mandiri setelah lepas dari Malaysia tahun 1965, telah berhasil mengangkat negara kota ini begitu kuat secara ekonomi. Brunei Darussalam yang merdeka 1 Januari 1984, telah menjadi negara terkaya di dunia. Secara politik ada batas-batas yang jelas yang memisahkan puak Melayu ke dalam wilayah geografi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sejarah telah mencatat, betapa usaha menyatukan puak Melayu secara politik, selalu gagal lantaran di dalamnya ada masalah politik yang tak gampang diselesaikan. Oleh karena itu, usaha penyatuan puak Melayu secara politik, juga sudah tidak realistis lagi. Di sinilah, Riau yang pernah menjadi pusat kebudayaan Melayu mempunyai posisi yang sangat strategis. Ia secara emosional, kultural, dan sosial, mempunyai ikatan tradisional yang sulit dipisahkan. Sebagai puak Melayu, Riau dalam pengertian kultural, seperti merasa tidak mempunyai sekat yang menghalangi hubungan sosio-kultural dengan saudara-saudaranya di wilayah Semenanjung.

Tantangan Malaysia Pasca Kemerdekaan

Salah satu masalah besar dihadapi Malaysia ketika merdeka adalah kesadaran orang Melayu terhadap kekuatan nasionalisme Islam secara konfrontatif. Mereka tidak sekadar berusaha memurnikan agama dari pengaruh-pengaruh non-Islam, namun juga semakin melihat adanya kontradiksi antara tujuan nasional dengan tujuan-tujuan Islam (Thohir, 2009:268).

Mereka menginginkan membentuk negara Islam sesuai dengan agama orang-orang Melayu dan tidak mau bekerja sama dengan orang-orang Cina. Mereka mengelompok dalam PAS (Partai Islam Melayu).

Di samping itu, orang-orang Cina bergabung dalam MCA (partai khusus etnis Cina) ada yang lalu keluar dan membentuk DAP (*Democratization Action Party*), langsung menjadi partai pembangkang (Wiharyanto, 2012:98). Partai oposisi non-Islam yaitu *Democratic Action Party* (DAP) mengklaim sebagai partai

multi agama dan multirasial, namun dalam kenyataannya mendukung kepentingan Cina (Thohir, 2009:268-269).

Orang-orang Melayu lebih senang memerintah sendiri negerinya, sebab mereka orang pribumi asli, tetapi Inggris memilih orang-orang Melayu saja yang berkuasa tanpa mengikutsertakan orang-orang Cina dan India.

Ancaman orang-orang Cina lebih berat, ini dikarenakan hampir semua roda perekonomian negeri ini dipegang oleh orang Cina. Akhirnya dengan adanya tekanan dari Inggris, terciptalah suatu konsensus nasional yang menyatakan bahwa negeri itu diberi kemerdekaan dengan pemerintah secara koalisi rasial (Wiharyanto, 2012:97).

Keuntungan diperoleh oleh masyarakat Melayu dalam konsensus ini bahwa warga Cina tidak boleh mengganggu gugat hak-hak istimewa Melayu (pribumi asli). Sebaliknya, orang-orang Melayu memainkan peranan lebih besar dalam bidang politik. Keuntungan bagi warga Cina, bahwa mereka diakui sebagai warga negara Malaysia dan mereka dapat pula berbicara di forum politik dan tidak akan mempersoalkan kekayaan orang-orang Cina. Sedangkan keturunan India bertindak sebagai *balancer* (penyeimbang) (Wiharyanto, 2012:98).

Keberhasilan Malaysia dalam mempertahankan integritas dan stabilitas nasional walau belum sempurna seutuhnya, disebabkan oleh beberapa faktor; *pertama*, Inggris telah berhasil mendidik bangsa Malaysia untuk menikmati pendidikan politik termasuk melatih masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, walaupun Inggris sendiri telah menindas bangsa ini lebih dari seratus tahun (Sunarti, 2014).

Kemudian apabila berhasil membentuk pemerintahan, maka daerah jajahan tersebut diberi kemerdekaan penuh. Tindakan ini juga dilakukan di India, Singapura, dan di beberapa daerah jajahan Inggris lainnya.

Kedua, penduduk negeri ini masih memegang teguh konsensus nasional yang disepakati sewaktu akan diberi kemerdekaan oleh Inggris. *Ketiga*, pergantian pucuk pimpinan dalam pemerintahan Malaysia secara konstitusional terjadi secara teratur.

Dengan demikian, negara dengan julukan "Negeri Jiran" ini juga pernah mengalami tantangan saat mendirikan negara agar utuh dan stabil dalam hal politik, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia, walaupun perbedaannya sangat signifikan.

Indonesia lebih tantangan dari luar yakni Agresi Militer Belanda dan dari dalam gerakan ekstrimis dari organisasi yang ingin mendirikan negara Islam. Sedangkan Malaysia, tantangan awal kemerdekaan secara total berasal dari dalam negaranya sendiri yakni perihal rasisme dan oknum ekstrimis yang melabelkan Islam. Akan tetapi pada akhirnya, permasalahan itu semua mampu ditanggulangi oleh pemerintahan mereka sendiri dibantu oleh pihak Inggris.

D. SIMPULAN

Sejatinya isu Melayu Raya (Indonesia Raya) dapat diwujudkan asalkan kedua negara tersebut saling kompromi dalam politik dan juga masyarakat di antara kedua negara tersebut. Berkaca dari upaya para pemuda Melayu dan juga sebagian etnis non Melayu melalui gerakan partai politiknya berusaha untuk mewujudkan Melayu Raya di bawah naungan Indonesia.

Meskipun pada kenyataannya gagal di tengah jalan karena adanya ambisi dan egoisme dari para pendiri kedua negara tersebut yang membuat menjadi sebuah permusuhan hingga saling klaim kebudayaan oleh para warga sosial media. Permusuhan ini tentunya merambah pada isu liga sepak bola apabila kedua negara tersebut bertanding. Saling umpat dan ejek tidak dapat dihindarkan karena faktor sejarah dan politik adu domba di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal & Skripsi

- Arifin, A. 2014. Local Historians and the Historiography of Malay. *Kajian Malaysia*, 32(1), 1–35.
- Basri, M. 1986. Perak Sebelum dan Selepas Perang Dunia Kedua: Satu Analisis tentang Nasionalisme Orang Melayu. In *Analisis* (Vol. 1, Issue 1, pp. 121–160).

- Cipta, S.E. 2019. Baharuddin al Helmy & Ibrahim Haji Yakoob: Two Descendants of Bugis and Minangese in Nationalism in Malaysia. *Prosiding Sosial Perkotaan UNS (hal. 144) Fakultas Ilmu Politik Universitas Sebelas Mare*.
- Choung, J.W. 2012. "Mine, Yours, or Ours "The Indonesian Malaysian Overshared Cultural Heritage. *Sojourn: Journal of Social issues South East Asia. Vol 27 (1) hal 1-53 t*
- Budiawan. 2015. Cultural and Political Relation; between Malay(sia) Writers and Their Indonesian Counterpart 1950-1965. *Journal Asia Cultrural Studies Vol 16 (1) hal 85-95*
- Yayan Suryana Fatah. 2017. Soekarno dan Tunku Abdul Rahman: Kajian Pertentangan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia 1959-1967. *Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu*.
- Mahayana, M. S. 2007. Gerakan Budaya Menjelang Kemerdekaan Indonesia-Malaysia. *Makara Human Behavior Studies in Asia, 11(2), 48. <https://doi.org/10.7454/mssh.v11i2.110>*
- Saat, I. 2010. Peranan Politik Akhbar Suara Rakyat 1945–48. *The Political Role of The Suara Rakyat Newspaper 1945–48*.
- Buku**
- Ismaun, dkk. 2016. *Metodologi Sejarah*. Bandung: Asosiasi Pendidikan Sejarah.
- Sjamsuddin, H. 2015. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sunarti, L. 2014. *Persaudaraan Sepanjang Hayat: Mencari Jalan Perjalanan Damai Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966*. Tangerang Selatan: Serat Alam Media.
- Wiharyanto. 2012. *Sejarah Asia Tenggara: Dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme sampai Terbangunnya Kerja Sama ASEAN*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Johari, Mohd, Zaki. 2017. *Peranan Politik Akhbar Suara Rakyat 1945–48 (The Political Role of The Suara Rakyat Newspaper 1945–48)*. [Desertasi]. Universiti Sains Malaysia.
- Thohir, A. 2009. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar Sejarah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Arsip**
- Surat Kabar Melayu, Terbitan Desember 1947
- Surat Kabar Kebayan Jelita
- Internet**
- Jelita. 2020. *Hartal 1947: Mogok Perama Di Tanah Melayu*. [Online]. Diakses dari <https://www.thepatriots.asia/hartal-1947-mogok-pertama-di-tanah-melayu/>. 28 Juni 2023.
- Iskandar, Amin. 2007. 60 tahun selepas Hartal. [Online]. Diaksea dari <https://www.malaysiakini.com/columns/73919>
- Reza, Fahmi. 2018. Mokhtaruddin Lasso Satu Kisah Sejarah. [Online]. Diakses dari <https://twitter.com/kuasasiswa/status/1008985485367115776?lang=zh-Hant>. 28 Juni 2023